DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2017, Menguak Tabir Hukum, Edisi Ke 2, Kencana, Jakarta.
- Umar Nain, 2017, Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintaha, Udentita Universitas Hasanuddin, Makassar.
- R. Bintarto, 2010, Desa Kota, Alumni, Bandung.
- Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Edisi Ke 12, Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdullah, Taufik, 2011, Sejarah dan Masyarakat, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- N. Daldjoeni, 2011, Interaksi Desa, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutoro Eko, 2014, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Adisasmita, Raharjo, 2006, Membangun Desa Partisipatif, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Borni Kurniawan, 2015, Desa Mandiri, Desa Membangun, Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2011, Dinamika Ketatanegaraan Indonesiadan Alam Putusan Mahkama Konstitusi, FH UII Prees, Yogyakarta.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2016, "Hukum Pelayanan Publik Berbasis Pertisipasi Dan Keterbukaan Informasi", Setara Press, Malang.
- Nata Irwana, 2017, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Eny Kusdarini, 2019, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara, UNY Press, Yogyakarta.

Jurnal

- Ali Marwan HSB, Evlyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Legislasi Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Jl. Putri Hijau Nomor 4 Medan, Vol. 15, Nomor 2, Juli 2018.
- Sugiman, "Pemerintahan Desa", Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7, Nomor 1 Juli 2018.

Peraturan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Aats Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Deas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN **FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp: (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

Nomor

: 4012/UN4.5.3/PT.00/2021

Lampiran

: PENELITIAN

Makassar, 19 Mei 2021

Kepada

Yth.

Hal

: Kantor Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar

di.-

Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas:

Nama

: ARHAM ALFANDI

No. Pokok

: B021171009

Prog. Studi

: Hukum Administrasi Negara

Alamat

: TAKALAR

Pembimbing

: 1. Prof. Dr. Achmad Ruslan ,SH.,MH

2. Dr. Naswar ,SH.,MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul:

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH PEJABAT KEPALA DESA DI DESA TOPEJAWA

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,

Kemitraan,

Hasrul SH.,MH 10418 200212 1 004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;

2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KECAMATAN MANGARABOMBANG KANTOR DESA TOPEJAWA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 219 / DTP / IX / 2021

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini Kepala Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Menerangkan Bahwa Mahasiswa Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar :

Nama

: Arham Alfandi

Nim

: B021171009

Jurusan

: Hukum

Program Studi

: Hukum Administrasi Negara

Benar-benar Telah Melakukan Penelitian Mulai Dari Tanggal 31 Mei 2021 Sampai 1 Agustus 2021 Di Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Untuk Menyusun Skripsi dengan Judul **Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui Oleh:

Pj. Kepala Desa Topejawa

ASRUL KADIR, S.Sos, M.S. Nip. 19830421 200502 1 002